

Edisi : Mei/ 2010

PERLAKUAN BIAYA PINJAMAN MENURUT PSAK 26 REVISI 2008



Oleh:

Rian Ardhi Redhite dan Tim

Auditor KAP Syarif Basir & Rekan

Perlakukan Biaya Pinjaman

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 26 revisi 2008 tentang Biaya Pinjaman (*Borrowing Costs*) telah dinyatakan efektif berlaku pada 1 Januari 2010. PSAK ini merupakan adopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 23 tahun 2007, serta merupakan revisi atas PSAK 26 sebelumnya yang dinyatakan efektif pada 1 Januari 1997.

Di dalam paragraf 1 PSAK 26 revisi 2008, diatur keharusan mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset kualifikasian. Sedangkan terhadap biaya pinjaman lainnya harus dibebankan secara langsung ke dalam laba rugi tahun berjalan.

Yang dimaksud aset kualifikasian dalam PSAK 26 revisi 2008 tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 5 adalah aset yang membutuhkan periode waktu yang lama untuk diproduksi agar siap digunakan oleh manajemen atau dijual sesuai dengan maksudnya. Sedangkan biaya pinjaman adalah biaya yang muncul dari perolehan dana seperti bunga dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman yang diberikan dari pihak lain kepada perusahaan.

Dengan adanya kriteria bahwa aset kualifikasian harus memenuhi syarat waktu yang lama untuk memproduksinya, maka tidak semua aset yang diproduksi oleh manajemen dapat dikategorikan sebagai aset kualifikasian dan menerapkan PSAK 26 tersebut. Sebagai contoh, apabila manajemen memproduksi aset berupa persediaan yang tidak membutuhkan waktu yang lama agar siap dijual ataupun seperti kendaraan yang dapat segera digunakan, maka jika pembelian ini berasal dari pinjaman, biaya pinjamannya tidak dapat dikapitalisasi ke dalam aset, karena tidak termasuk dalam klasifikasi aset kualifikasian.

Kemudian mengenai biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, menurut paragraph 6 PSAK 26 revisi 2008, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah:

1. Bunga cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang
2. Amortisasi diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
3. Selisih kurs pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga

PSAK 26 Revisi 2008 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2010 ini telah memberikan tambahan kejelasan mengenai perlakuan biaya pinjaman, memperjelas waktu dan syarat dimulainya kapitalisasi, serta tentu lebih konsisten dengan IAS. Penerapan PSAK ini juga dapat dijadikan sarana bagi manajemen untuk mengurangi beban tahun berjalan dengan menambahkan nilai aset atas kapitalisasi tersebut. Sebagaimana diketahui biaya pinjaman atas pembangunan aset kualifikasian umumnya membutuhkan pinjaman yang besar yang berarti besar pula biaya pinjaman untuk membuat aset tersebut. Oleh karena itu, dengan kapitalisasi tersebut dapat mengurangi beban tahun berjalan yang timbul dari biaya pinjaman untuk pembangunan aset kualifikasian tersebut.

Namun demikian, penerapan PSAK ini dapat menimbulkan beberapa polemik tersendiri yang menyangkut kehandalan laporan keuangan. Hal yang banyak ditakutkan dari penerapan PSAK 26 revisi ini, terutama bagi para investor adalah:

1. Laporan keuangan yang menerapkan kapitalisasi cenderung menjadi tidak relevan, akibat tidak adanya rincian mengenai penyebab timbulnya biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Akibatnya pengguna laporan keuangan tidak mengetahui bagian biaya pinjaman mana yang boleh dikapitalisasi, mana yang tidak.
2. Laporan keuangan menjadi tidak handal, akibat terkontaminasi oleh praktek semacam *earnings management* dan *window dressing*.

Sulitnya melakukan identifikasi atas biaya bunga juga diakui di dalam PSAK No. 26 paragraf 11 yang menyatakan "Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi suatu hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan aset kualifikasian dan menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan demikian terjadi, misalnya, ketika aktivitas pendanaan suatu entitas dikoordinasikan secara terpusat.

Kesulitan juga timbul ketika suatu grup menggunakan sejumlah instrumen utang untuk meminjam dana pada tingkat bunga yang bervariasi, dan kemudian meminjamkan

dana tersebut kepada entitas lain dalam grup tersebut dengan basis yang bervariasi. Kesulitan lain timbul dari penggunaan pinjaman dalam atau terhubung dengan mata uang asing, ketika grup beroperasi dalam ekonomi berinflasi tinggi, dan dari fluktuasi nilai tukar. Sebagai akibatnya, penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit, sehingga diperlukan pertimbangan (*judgement*).”

Perbedaan PSAK 26 Revisi 2008 dengan IAS 23 dan PSAK 26 Revisi 1997

Di atas telah disebutkan bahwa PSAK 26 revisi 2008 adalah hasil adopsi dari IAS 23. PSAK ini merupakan salah satu hasil program adopsi DSAK-IAI dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Namun demikian, jika dibandingkan dengan IAS 23 tahun 2007 nampak bahwa PSAK 26 revisi 2008 ini masih terdapat perbedaan yang terutama karena beberapa IAS yang terkait dengan IAS 23 belum diadopsi dalam PSAK-PSAK yang diterbitkan IAI. Berikut adalah contoh perbedaan tersebut:

1. IAS 23 paragraf 4 yang menjadi PSAK 26 paragraf 4, dimana menghilangkan paragraf 4(a) pada IAS 23 tentang pengecualian penerapan PSAK 26 untuk aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, seperti aset biologik, karena IAS 41: *Agriculture* belum diadopsi ke PSAK.
2. IAS 23 paragraf 9 yang menjadi PSAK 26 paragraf 9, dimana menghilangkan kalimat terakhir pada paragraf 9 IAS 23 tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi berinflasi tinggi, karena IAS 29: *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies* belum diadopsi ke PSAK.
3. IAS 23 paragraf 18 yang menjadi PSAK 26 paragraf 18, dimana menghilangkan kalimat tentang perlakuan akuntansi untuk penerimaan hibah pemerintah, karena IAS 20: *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* belum diadopsi ke PSAK.
4. IAS 23 paragraf 27 dan 28 tentang ketentuan transisi dihilangkan, karena PSAK 26 (Revisi 2008) yang menggantikan PSAK 26 (1997) tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi biaya pinjaman, hal ini berbeda dengan transisi dari IAS (1993) ke IAS (2007), yang mana IAS (1993) memberikan alternatif untuk mengkapitalisasi atau membebankan biaya pinjaman yang memenuhi syarat sebagai biaya perolehan suatu *qualifying asset*.

Sedangkan jika dibandingkan dengan PSAK 26 revisi 1997 yang digantikannya, perbedaan adalah terdapat pada:

1. PSAK 26 (revisi 2008): Biaya Pinjaman mengadopsi seluruh pernyataan dalam IAS 23 (2007): *Borrowing Costs*, kecuali untuk beberapa paragraf pada IAS 23 yang dihilangkan karena terkait dengan IAS lainnya yang belum diadopsi ke PSAK.
2. Prinsip inti PSAK 26 (revisi 2008) menyatakan bahwa biaya pinjaman yang memenuhi syarat diakui sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian, sedangkan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Hal ini tidak disebutkan

dalam PSAK 26 (1997) dimana biaya pinjaman harus dibebankan segera pada saat terjadinya, kemudian apabila biaya pinjaman tersebut secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi, produksi dari suatu *qualifying asset*, maka harus dikapitalisasi.

3. Penambahan contoh aset kualifikasian (tergantung keadaan) pada PSAK 26 (revisi 2008) yang tidak disebutkan di PSAK 26 (1997), yaitu aset tidak berwujud dan properti investasi.
4. PSAK 26 (revisi 2008) lebih memperjelas dan merinci waktu dan syarat-syarat dimulainya kapitalisasi biaya pinjaman dibandingkan PSAK 26 (1997).
5. PSAK 26 (revisi 2008) mengatur penghentian sementara jika tidak ada kegiatan pengembangan aset kualifikasian secara aktif, sementara PSAK 26 (1997) mengatur jika ada penangguhan kegiatan untuk periode yang cukup lama.
6. PSAK 26 (revisi 2008) menambahkan penjelasan mengenai kegiatan modifikasi kecil dimana kapitalisasi biaya pinjaman tetap harus dihentikan karena mengindikasikan seluruh aktivitas perolehan aset kualifikasian telah selesai.***